

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jl. Pendreh Km. 1 Telp (0519) 21704
<https://dispupr.baritoutarakab.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara.....	1
C. Isu Strategis	8
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Startegis.....	10
B. Perjanjian Kinerja	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	18
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2018 dan 2019.....	32
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka menengah .	34
4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	35
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Diberikan.....	36
6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	37
B. REALISASI ANGGARAN	39
IV. PENUTUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Muara Teweh, Januari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Utara,



Ir. Iwan Rusdani, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620306 199103 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berkewajiban setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, dan Tata Ruang, .

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Barito Utara.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan organisasi dan perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, maka susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat terdiri dari :
 - (1) Subbag. Tata usaha, data dan informasi publik yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata usaha, data dan informasi publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
 - (2) Subbag. Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- c. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/ penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun bahan dan merencanakan kegiatan.
- 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
- 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

- d. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang cipta karya yang meliputi melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan pengawasan program kerja penataan dan pendataan Keciaptakarya.
- 2) Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perencanaan segala usaha yang berkenaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
- 3) Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas pengelolaan pengembangan kawasan yang meliputi penataan bangunan dan pengembangan kawasan.

- e. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan,

penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bidang dan membuat konsep/kebijakan serta mengkaji ulang draft.
 - 2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan pengamanan pengairan serta penambangan bahan galian golongan C.
 - 3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoperasian, pelaksanaan program serta pemeliharaan pengairan.
- f. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pembinaan pentaan ruang.
 - 2) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana penataan dan pengembangan ruang.
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan, kebersihan dan keindahan kota.

Bidang Tata Kota terdiri dari :

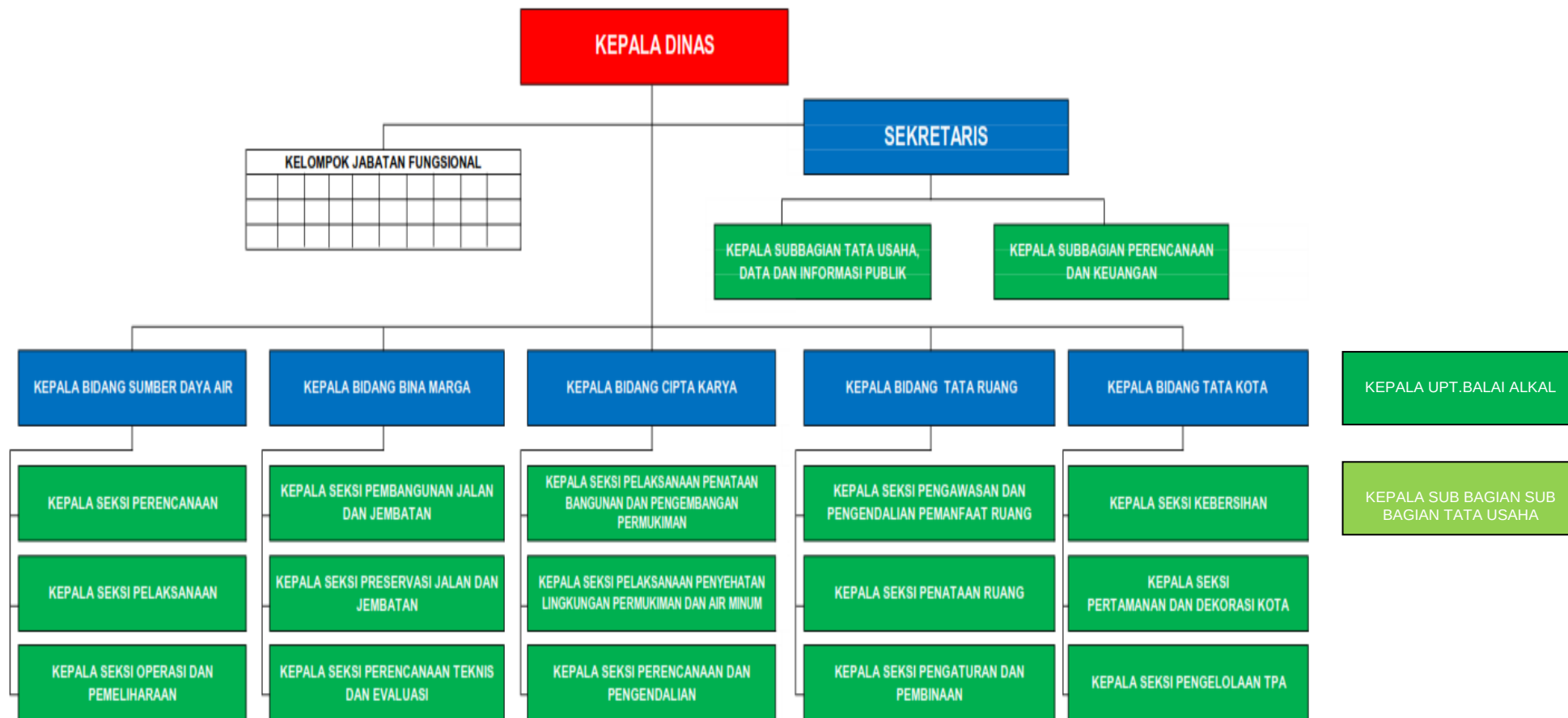
- 1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan pola induk kebersihan kota dan melaksanakan kegiatan perumusan rencana dan program kerja penataan kebersihan lingkungan dan kota.

- 2) Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan pengaturan pertamanan dan dekorasi kota sesuai dengan bidang dan tugasnya.
 - 3) Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan dalam rangka penataan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah.
- h. Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang dibentuk dan mulai operasional menjadi Balai mulai Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Balai Pengelolaan Perbekalan dan Peralatan (ALKAL) dipimpin oleh Kepala Balai yang mempunyai tugas untuk pengelolaan Peralatan Laboratorium, Alat-alat Berat dan membantu tupoksi kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Kepala Balai merupakan Jabatan Eselon IV/a (setara Kasi/Kasubbag) dan Kepala Tata Usaha pada Balai setara Eselon IV/b. Kepala Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga pengelolaan keuangan dilaksanakan secara mandiri dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA



Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 26 Oktober 2016
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara
 Nomor : 38 Tahun 2016
 Tanggal : 14 Desember 2016
 Tentang : Susunan Organisasi dan Perangkat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

C. Isu Strategis

Isu Strategis yang menjadi fokus perhatian dan menjadi arah kebijakan utama dalam permasalahan pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang meliputi :

1. Jalan dan Jembatan untuk akses transportasi ke seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara;

Sesuai dengan Visi, Misi dan prioritas program Bupati Barito Utara terpilih, pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama program yang harus dipenuhi. Hal ini memang sangat beralasan karena menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang kelancaran arus transportasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi tantangan bahkan masalah adalah cakupan wilayah yang luas dengan tingkat sebaran permukiman penduduk yang cukup sulit terjangkau serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia.

2. Sanitasi Perkotaan dan peningkatan sarana prasarana permukiman;

Sanitasi perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi dan tingkat perekonomian serta tingkat pendidikan yang rata-rata masih kelas menengah dan bawah menjadikan aspek sanitasi masih kurang mendapat perhatian masyarakat, sehingga masih perlu penanganan yang cukup intensif dari pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

3. Pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau;

Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menjadi perhatian penting karena menyangkut ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

4. Peningkatan dan pengelolaan Drainase;

UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam konsep drainase berwawasan lingkungan, hal ini mengingat pengelolaan drainase juga menyangkut banyak aspek dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

5. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.

PerMen PU No.16/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 11 (ayat 2) tentang Penataan Ruang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan amanat yang menjadi vital peranannya dalam berbagai aspek sehingga perlu dijabarkan walaupun dalam kompleksitas masalah yang cukup tinggi dalam pelaksanaannya ditingkat lapangan selama ini karena menyangkut berbagai kepentingan orang per orang, kelompok bahkan korporasi.

6. Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan.

Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan guna mewujudkan ketahanan pangan menjadi isu strategis ketika dihubungkan dengan kenaikan jumlah penduduk dan tingginya laju konversi lahan beririgasi menjadi daerah pemukiman/industri. Peningkatan produksi padi Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu kunci pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pemetaan zonasi potensi pengembangan lahan irigasi telah dilakukan namun untuk menentukan kebijakan pengembangan lahan diperlukan terhadap kenaikan produksi dan investasi biaya guna mengetahui efektifitas pengembangannya. Pengembangan daerah irigasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi beras nasional melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi diperlukan untuk meningkatkan produksi tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2019 ini disusun disamping mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari Eselon III Mandiri, dan Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis. Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi

tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

Perumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi”** serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian tujuan ke-1 yaitu **“Meningkatnya konektivitas antar wilayah”** serta pencapaian sasaran ke-1 yaitu **“Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah”** dan Sasaran ke-2 yaitu **“Meningkatnya desa yang terhubung listrik”**.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada hakekatnya adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dimana tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan.

Sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	indikator
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik

Terkendalinya penanganan kerusakan akibat banjir dan berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik
		Persentase rumah tinggal bersanitasi
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW
Terwujudnya lingkungan yang bersih	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbunan sampah yang ditangani

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi disetiap lini/level di lingkungan kerjanya karena merupakan sarana tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terarah sesuai target. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) PD Tahun 2019, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	36,11 %
	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	73,86 %
Meningkat nya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	23,23 %
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45,00 %
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	46,83 %
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	64,10 %
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	55 %
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	0,56
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	89,12 %

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2019.

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 89.742.819.000	DAK Infrastruktur Jalan sebesar Rp.24.389.819.000
2.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 3.267.200.000	
3.	Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat	Rp. 2.960.600.000	
4.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 5.295.815.322	DAK Infrastruktur Irigasi sebesar Rp.3.163.671.000
5.	Program Pengendalian Banjir	Rp. 6.824.032.104	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Rp. 17.065.000.000	
7.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 3.501.875.000	
8.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 3.734.530.000	
9.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 1.100.000.000	
10.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 1.030.000.000	DAK Rp. 1.030.000.000
11.	Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Rp. 295.000.000	
12.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 630.455.000	
13.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 11.766.250.000	
14.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 6.122.367.500	

- Sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dimana terbagi menjadi 2 indikator sasaran yaitu : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam) dengan target 36,11 % dan Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik dengan target 73,86 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, penanggulangan banjir dengan indikator Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran

sungai rawan longsor target 23,23 % dan Target kinerja prosentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 75%.

- Sasaran strategis meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih dengan target persentase rumah tangga berakses air bersih sebesar 46,83 %.
- Sasaran strategis Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman dengan target indikator Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 64,10 % dan Persentase rumah tinggal bersanitasi 55 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW 0,56.
- Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dengan target indikator timbulan sampah yang ditangani 89,12 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2019 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan organisasi, dan untuk ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan. Oleh sebab itu disini nantinya akan disajikan tentang gambaran ringkas tentang capaian perjanjian kinerja tahun 2019 yang selanjutnya sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun

sebelumnya. Adapun perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel. 3.1 Realisasi Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	• Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	36,11 %	34,30 %	94,98
		• Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	73,86 %	79,33 %	107,40
2.	Meningkat nya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	• Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	23,23 %	13,34 %	57,42
		• Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45,00 %	47,10 %	104,66
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	• Persentase rumah tangga berakses air bersih	46,83 %	47,58 %	101,60
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	• Persentase drainase dalam kondisi baik	64,10 %	67,13 %	104,72
		• Persentase rumah tinggal bersanitasi	55 %	50,37 %	91,58
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	• Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	0,56	0,54	96,42
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	• Timbulan sampah yang ditangani	89,12 %	89,61 %	100,54
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA TAHUN 2019					95,48

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan				
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Realisasi 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	36,11 %	34,30 %	94,98	32,78 %
2. Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	73,86 %	79,33 %	107,40	69,81 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{2018 + Realisasi 2019 + PJKB}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}} \times 100 \% \\
 & = \frac{22,94 + 11,52 + 225,58}{758,14} \times 100 \% = 34,30 \%
 \end{aligned}$$

Target 36,11 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar **34,30 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan pembangunan jalan adapun hasil capaian di tahun 2019 di dapat dari tipe pekerjaan pengaspalan dan rigid dimana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Paket Pekerjaan Jalan Tahun 2019

No.	Paket	Aggregat B (m')	Aggregat A (m')	Rigid (m')	Aspal (m')	Timbunan (m')	Pemb Badan Jalan (m')	Parit Beton (M')	Turap (M')	KETERANGAN
	DAK REGULER 2019									
1	Peningkatan Jalan Lahei - Luwe (Lanjutan)	-	5,630.00	5,630.00						
		-	5,630.00	5,630.00						
1	Peningkatan Jalan di Kabupaten Barito Utara (Swakelola)	306.00	535.25	2,051.73	121.57	1,016.00	43,688.00			
2	Overlay dalam kota (Jl. Yetro Sinseng, Jl. Wonorejo, Jl. Permata Hijau, Jl. Kuburan Muslimin Baitil Atiq)		579.93	88.00	2,217.00					
3	Peningkatan Jalan Km. 2,5 Muara Teweh - Pendreh - Desa Parang Kampeng (Lanjutan)			809.67			2,000.00			
4	Peningkatan Jalan Menuju Islamic Center (Lanjutan)			198.00			198.00			
5	Peningkatan Jalan Tumpung Laung - Sikan (lanjutan)					1,800.00	1,800.00			Geotextile 1800 M
6	Peningkatan Jalan Muara Wakat (Lanjutan)			410.00			4,070.00			
7	Peningkatan Jalan Desa Lemo Seberang (Lanjutan)			374.00			374.00			
8	Pembangunan Jalan TMMD						8,100.00			
9	Peningkatan Jalan dari Desa Lemo II ke arah Dusun Pararawen (lanjutan)			655.00			655.00			
10	Peningkatan Jalan UPTD BBI di Kelurahan Lahei I			97.26						
11	Peningkatan Jalan Desa Liang Naga			520.00			3,430.00			
12	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Keramat Mangkomot di Benangin (lanjutan)			446.00			1,622.00			
13	Pembangunan Jalan Km. 50 - Desa Jamut - Sp. Liju			91.00						
14	Peningkatan Jalan Kelurahan Montallat I ke Kelurahan Tumpung Laung I			135.29			135.29			
15	Peningkatan Jalan Desa Malegoi			335.00			185.00			
16	Penanganan Longsor Jalan Sengaji Hulu								15.00	Sheet Pile: 63 Btg x 6 x 48 Kg/m
17	Penanganan Longsor Jalan Pendreh								40.00	Turap Beton, Pancang Tiang Baja Dia. 30, 40 Buah

No.	Paket	Aggregat B (m')	Aggregat A (m')	Rigid (m')	Aspal (m')	Timbunan (m')	Pemb Badan Jalan (m')	Parit Beton (M')	Turap (M')	KETERANGAN
18	Pembuatan Drainase Jalan Pramuka									Parit, panjang = 235,85 M
19	Peningkatan Jalan Manggala Menuju Lapangan Bola Tembus SMP 3			25.00			2,000.00			
20	Peningkatan Jalan SDN-4 Jambu Manggala Kelurahan Jambu			106.95			110.00			
21	Peningkatan Jalan Transbangdep - Sp. Lemo (Jl. Muek)			625.00			760.00			
22	Peningkatan Jalan Panti Ajar Menuju Asrama Polisi tembus Jalan Giri			294.00			294.00		15.00	
23	Peningkatan Jalan Rigid Jalan Kelurahan Montallat I - Montallat II (lanjutan)			89.00			66.00			
24	Pembukaan Jalan Tembus Kec. Teweh Selatan - Kec. Gunung Timang dari Desa Pandran Raya - Desa Pandran Jati						8,554.15			
25	Pembukaan Jalan Tembus dari Desa Pandran Permai - Desa Pandran Raya			87.00			87.00			
26	Pembukaan Jalan Tembus Rigid Jl. Manunggal - Jl. Inpres RT.03 Kel.Jingah			109.00			277.00			
27	Peningkatan Jalan Rigid Desa Bukit Sawit RT.05			83.00			83.00			
28	Peningkatan Jalan Rigid Desa Bukit Sawit RT.07			83.00			83.00			
29	Peningkatan Jalan Lintas Pelajar Desa Trinsing - Trahean (lanjutan)			582.00			582.00			
30	Peningkatan Jalan Menuju Pondok Pesantren Nurrahman di Desa Batu Raya I			86.00						
31	Peningkatan Jalan Negara Km. 52 - Simp. Trans 38	480.00					7,000.00			
32	Pelebaran Jalan Kelurahan Tumpung Laung I Menuju Montallat I (kiri kanan 1 m)			796.00						
33	Peningkatan Jalan Montallat – Sikan						2,950.00			
		786	6,745	9,177	2,339	2,816	89,103	0	70	

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2019

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/
pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

b. Indikator kinerja 2 : Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{2018 + Realisasi 2019 + PJKB}}{\text{Panjang Jembatan Seluruhnya}} \times 100 \% \\ & = \frac{320,76 + 436,0 + 2878,6}{4582,30} \times 100 \% = 79,33 \% \end{aligned}$$

Target 73,86 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar **79,33 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan pembangunan jembatan adapun hasil capaian di tahun 2019 di dapat dari beberapa tipe pekerjaan rangka baja, beton, box culvert, kayu ulin dan gantung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Paket Pekerjaan Jembatan Tahun 2019

No.	Paket Kegiatan	Rangka Baja	Beton	Box Culvert	Kayu Ulin	Gantung	KETERANGAN
1	Pembangunan/Penggantian Jembatan di Kabupaten Barito Utara (Swakelola)		120.0	-	-		
2	Pembangunan Jembatan Sei Lahei I - Lahei II (Lanjutan)	95	42	-	-		Bentang Jembatan 95 Meter Pengecoran Lantai Jembatan dan Pembuatan Oprit 80 Meter
3	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Nihan - Mukut (Lanjutan)	√	24.0		-		Penyediaan baja, pabrikasi/pemasangan jembatan,
4	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Nihan Hilir (Lanjutan)					80.0	Pengadaan dan Pemancangan Pipa Baja 40 cm P=12 M 7 titik
5	Pembangunan Jembatan Sei Karamuan KM 32 - Desa Karamuan						Pekerjaan Pondasi sumuran dan abutmen, bentang Jembatan 24 M
6	Pembangunan Box Culvert Jalan Kakah Tundan RT.03 Desa Benangin				√		Tidak dikerjakan anggaran terlalu kecil
7	Pembangunan Jembatan Gantung Sei Teweh Desa Gandring - Panaen (Lanjutan)				28.0		End Block / Jangkar 6 x 4,5 (2 sisi)
8	Pembangunan Jembatan di Desa Sikui Km. 27	√					Pemancangan tiang pipa baja 12 btg
9	Pembangunan Jembatan ke arah SMAN Sikui	24.0					Pengadaan dan Pemasangan rangka baja, Jembatan 24 M
10	Pembangunan Jembatan Gantung Sikan - Tumpung Laung (Multiyears) (Rp. 22,8 Milyar)						Lelang Tahun2020
11	Pembangunan Jembatan Gantung Lemo Seberang - Desa Lemo (Multiyears) (Rp. 22,3 Milyar)						Lelang Tahun2020
12	Pembangunan bangunan bawah jembatan ruas jalan Kandui-Tongka						Pengadaan dan Pemancangan Pipa Baja 40 cm P=12 M, pada 40 Titik pancang, untuk 2 bh jembtan
13	Pembangunan bangunan bawah jembatan ruas jalan Kandui-Ketapang						Pengadaan dan Pemancangan Pipa Baja 40 cm P=12 M pada 28 Titik pancang, untuk 2 bh jembtan
14	Pembangunan Jembatan Desa Sikan						Pengadaan dan Pemancangan Pipa Baja 40 cm P=12 M 24 Titik, pada abutment dan pilar bentang jemb. 24,8 M

No.	Paket Kegiatan	Rangka Baja	Beton	Box Culvert	Kayu Ulin	Gantung	KETERANGAN
15	Pelebaran Jembatan Gantung Desa Mukut						Pengadaan dan Pemasangan Pipa Baja 40 cm P=12 M 12 Titik, pada abutment
16	Pembangunan Jembatan Sei Induk Desa Teluk Malewai						Pengadaan dan Pemasangan Pipa Baja 40 cm P=12 M, untuk 22 Titik, pada abutment dan pilar bentang jemb. 24,8 M
17	Pembangunan Jembatan di Desa Benangin I						Abutment (2bh) 4 x 1,7 m
18	Pembangunan Jembatan Ulin di Gang Habibie				23.0		jembatan ulin panjang 17,5 m
19	Pembangunan Jembatan Sei Kambe di Sabuh						Pengadaan dan Pemasangan Pipa Baja 40 cm P=12 M 8 Titik, pada abutment dan pilar bentang jemb.24,53 M
20	Pekerjaan Urugan Jembatan Sei Tewe di Kel.Jambu						telah dikerjakan oleh balai P2JN
21	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Muara Tewe - Jingah (Lanjutan)	50+120+50					Cor Lantai 220 M, Pemasangan Rangka 125 M separo bentang dan pengadaan railing (sandaran)
		119.0	186.0	-	51.0	80.0	

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2019

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	23,23 %	13,34 %	57,42	13,23 %
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45,00 %	47,10 %	104,66	40 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi dan penanggulangan banjir” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus/perhitungan :} & \quad \frac{2018 + \text{Realisasi 2019} + \text{JL}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (JS)}} \times 100 \% \\
 & = \frac{5000 \text{ m} + 53 \text{ m} + 1615 \text{ m}}{50000 \text{ m}} \times 100 \% = 13,34 \%
 \end{aligned}$$

Target 23,23 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar **13,34 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pengendalian banjir dengan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dang tanggul sungai adapun hasil capaian di tahun 2019 di dapat dari beberapa paket pekerjaan pembuatan Siring dan pembuatan perkuatan tebing dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Paket Pekerjaan pengendalian banjir Tahun 2019

No	Paket Pekerjaan	Jumlah Bangunan	Panjang
1	Pembuatan Siring Jl. Kenanga / Kuburan Kristen Karang Jawa	1 Buah	28 M
2	Pembuatan Perkuatan Tebing Sei. Bengaris Jalan Pramuka	1 Buah	25 M
TOTAL			53 M

Sumber data : Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kab. Barut, 2019

Faktor Penghambat : Keterbatasan anggaran, untuk penanganan longsor sebagian diambil alih oleh bidang lain dikarenakan lokasi longsor berada pada bahu jalan sehingga penanganan longsor digabung satu paket dengan pembangunan jalan.

Faktor Pendorong : Tersedianya dana, Penyedia Jasa/ konsultan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

b. Indikator kinerja 2 : Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{2018 + \text{Realisasi 2019} + \text{LIK B}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten (LIK)}} \times 100 \% \\ & = \frac{387,25 + 550 + 2710,75 \text{ Ha}}{7745 \text{ Ha}} \times 100 \% = 47,10 \% \end{aligned}$$

Target 45,00 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar **47,10 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adapun hasil capaian di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut :

Tabel 3.5. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Tahun 2019

No	Paket Pekerjaan	Luas	Panjang
1	Rehabilitasi Jaringan Rawa D.I.R. Ruji	100 Ha	3226 M
2	Rehabilitasi Jaringan Rawa D.I.R. Sikan	250 Ha	2700 M
3	Rehabilitasi jaringan Rawa D.I.R. Tumpung Laung	200 Ha	8000 M
TOTAL		550 Ha	13.926 M

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 3 : Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih				
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Realisasi 2018
1. Persentase rumah tangga berakses air bersih	46,83 %	47,58 %	101,60	44,70 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase rumah tangga berakses air bersih

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{2018} + \text{Realisasi 2019} + \text{PBAM}}{\text{Jumlah Penduduk (JP)}} \times 100 \% \\
 & = \frac{723 \text{ m} + 932 \text{ m} + 13.753 \text{ m}}{32381} \times 100 \% = 47,58 \%
 \end{aligned}$$

Terget 46,83 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar **47,58 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum adapun hasil capaian di tahun 2019 dilihat dari peningkatan sistem prasarana air bersih perdesaan pemasangan perpipaan di desa liang buah dengan capaian realisasi volume 3 " = 424 m dan 2 " = 508 m

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/konsultan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman				
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Realisasi 2018
1. Persentase drainase dalam kondisi baik	64,10 %	67,13 %	104,72	61,06 %
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi	55 %	50,37 %	91,58	50,00 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase drainase dalam kondisi baik

$$\text{Rumus/perhitungan : } \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019} + \text{PJ (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten}} \times 100 \%$$

$$= \frac{400 \text{ m} + 832,3 \text{ m} + 7973 \text{ m}}{13711 \text{ m}} \times 100 \% = 67,13 \%$$

Target 64,10 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar **67,13 %**. Beberapa masalah drainase dipertanian yaitu.

Faktor Penghambat : kawasan yang terbangun mencakup daerah hulu dan hilir semakin berkembang dan mengurangi luasan tanah sebagai penyerap air dan berkembangnya kawasan terbangun dan perkotaan menyebabkan meningkatnya limpasan air permukaan yang tidak dapat diserap kembali ke tanah. Masalah lainnya yaitu perkembangan kawasan perkotaan yang padat penduduk melahirkan sebagian kawasan kumuh, kotor dan kualitas lingkungan yang rendah disebabkan oleh ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang air limbah dan sampah disaluran drainase

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/konsultan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah adapun hasil capaian di tahun 2019 didapat dari beberapa paket pekerjaan diantaranya pembuatan parit, pembuatan saluran limbah dan pembuatan gorong-gorong.

b. Indikator kinerja 2 : Persentase rumah tinggal bersanitasi

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{2018 + Realisasi 2019 + JRS}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100 \% \\ & = \frac{2189 \text{ KK} + 120 \text{ KK} + 14002 \text{ RT}}{32381 \text{ RT}} \times 100 \% = 50,37 \% \end{aligned}$$

Target 55 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar **50,37 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pembangunan sanitasi perkotaan dengan kegiatan Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan adapun hasil capaian di tahun 2019 didapat dari beberapa paket pembangunan Tanki Septic Skala Komunal ada 12 unit pembangunan terdapat 6 unit di kelurahan lanjas dan 6 unit di kelurahan jambu. Dari 1 unit didapat 10 KK maka 6 unit didapat 60 KK.

Sanitasi merupakan penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feces mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Masyarakat di Kabupaten Barito Utara terutama di perdesaan, kurang memahami pentingnya sanitasi bagi kesehatan mereka. Hal ini salah satunya dikarenakan rendahnya pengetahuan mereka. Kondisi ini menyebabkan banyak jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Rendahnya tingkat kesadaran juga menyebabkan pelayanan sarana sanitasi yang terbangun tidak dapat berkelanjutan. Banyak fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) yang dibangun tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan terabaikan. Bila masyarakat telah menyadari pentingnya sanitasi, khususnya berkaitan dengan kesehatan dan produktivitas, maka kebutuhan terhadap prasarana dan sarana sanitasi akan meningkat.

Sasaran 5 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang				
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Realisasi 2018
1. Persentase kesesuaian pemanfaatn RTRW	0,56	0,54	96,42	0

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase pemanfaatan RTRW

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan :} & \quad \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{Realisasi 2019} + \text{LRTH}}{\text{Luas Wilayah ber HPL/HGB (LW)}} \\ & = \frac{0,0 + 0,1 + 1,01}{2,07 \text{ Ha}} = 0,54 \end{aligned}$$

Target 0,56 dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 sebesar **0,54 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program perencanaan tata ruang dengan kegiatan penyusunan rencana teknis ruang kawasan .

Faktor Penghambat : Untuk mendukung rencana pengembangan kawasan di wilayah Kabupaten Barito Utara maka perlu data perencanaan kawasan yang mantab dan kepastian hukum terkait kawasan. Adapun produk dimaksud yaitu Raperda Rencana Detail Tata Ruang

Faktor Pendorong : Tersedianya dana dan SDM

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Mempercepat Penyusunan Perda RDTR

Sasaran 6 : Meningkatnya pengelolaan persampahan				
Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Realisasi 2018
1. Timbulan sampah yang ditangani	89,12%	89,61%	100,54%	95,15 %

KETERANGAN :

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima yaitu “ Meningkatnya pengelolaan persampahan ” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Meningkatnya pengelolaan persampahan

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Volume Sampah 2019}}{\text{Total Timbulan Sampah (TS)}} \times 100 \% \\ & = \frac{62.999}{70.299} \times 100 \% = 89,61 \% \end{aligned}$$

Timbulan sampah yang ditangani sebesar **89,12 %** dan terealisasi **89,61 %** sehingga capaian kinerja sebesar **101,95 %**. Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten pada saat ini masih berada di Ibu Kota Kabupaten Barito Utara yaitu kota Muara Teweh yang berada di Kecamatan Teweh Tengah, sedangkan lingkup pelayanan kebersihan meliputi 2 kelurahan yaitu kelurahan Melayu dan kelurahan Lanjas dengan luas 22.117 Ha.

Pengelolaan sampah :

- Jumlah timbunan sampah pada sekitar 90 – 98 m3/ hari atau 60 – 65,3 ton yang terbagi 36 TPS/Kontainer permanen dan 40 bak sampah profil
- Jumlah volume sampah terangkut sekitar 47 – 53 ton/hari
- Jumlah sampah yang tidak terkelola sekitar 18-20 m3/hari
- Timbunan Sampah di TPA rata-rata setiap hari sekitar 47 ton/hari
- Timbunan Sampah se Kabupaten Barito Utara 70.299 M3/Tahun atau 195 M3/hari

Sumber data : Bidang Tata Kota DPUPR Kab. Barut,2019

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya dana, SDM, Sarana Prasarana

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

A.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2019

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019	
			Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	- Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik - Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	34,30 % 79,33 %	94,98 107,40
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	- Persentase Pemabngunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor - Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	13,34 % 47,10 %	57,42 104,66
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	47,58 %	101,60
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	- Persentase drainase dalam kondisi baik - Persentase rumah tinggal bersanitasi	67,13 % 50,37 %	104,72 91,58
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	0,56	96,42
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	84,61 %	100,54
CAPAIAN RATA-RATA				95,48

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018	
			Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Panjang jalan dalam kondisi baik - Panjang jembatan dalam kondisi baik - Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	48,7 % 369,2 km 4.577,30 15 Unit	69,57% 86,87% 183,92% 75,00%
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik	- Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan - Prosentase pemeliharaan sungai - Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ direhabilitasi	13 Buah 100% 3 Unit	72,00% 133% 100%
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/direhab	10 buah	90,90 %
4.	Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab	11 buah	366%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018	
			Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Panjang drainase yang dibangun/direhab	626 m	13,91 %
5.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	2.418 m	268 %
6.	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah produk Tata ruang	3 buah	25,00 %
7	Meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka yang asri	- Prosentase penanganan sampah - Jumlah petugas kebersihan kota - Jumlah peralatan pengelolaan persampahan dalam kondisi baik - Jumlah petugas pemeliharaan RTH	95,15% 216 org 24 unit 60 org	99,60% 131,70% 120% 139,53%
CAPAIAN RATA-RATA				123,43 %

Capaian kinerja tahun 2019 rata rata sebesar 95,48% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja rata rata tahun 2018 sebesar 123,43% terjadi penurunan capaian kinerja.

Ada beberapa sebab terjadinya penurunan pertama yaitu karena jumlah indikator yang dinilai pada tahun 2018 lebih banyak berjumlah 16 indikator daripada tahun 2019 yang berjumlah 9 indikator. dimana metadata indikator tahun 2018 lebih mudah dan capaian kinerjanya melebihi 100%.

Penyebab kedua yaitu anggaran untuk mencapai indikator kinerja tahun 2019 kurang memadai karena anggaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang masih ada anggaran yang tidak untuk memenuhi indikator kinerja seperti pekerjaan rsud muara teweh, pekerjaan rumah jabatan, rehab kantor kelurahan melayu, master plan perkantoran dimana sebesar **Rp. 50.690.470.000,-** atau **22%** dari pagu total Dinas PUPR sebesar **Rp. 230.364.614.346,-**

A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target pada Renstra 2018-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Renstra Tahun 2019	
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	34,30 %	94,98	36,11 %	94,98
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	79,33 %	107,40	73,86 %	107,40
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	– Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	13,34 %	57,42	23,23 %	57,42
		– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	47,10 %	104,66	45,00 %	104,66
3.	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	47,58 %	101,60	46,83 %	101,60
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	67,13 %	104,72	64,10 %	104,72
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	50,37 %	91,58	55 %	91,58
5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatn RTRW	0,54	96,42	0,56	96,42
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	– Timbulan sampah yang ditangani	90,86 %	101,95	89,12 %	101,95
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA			95,48 %		95,48 %	

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas PUPR Tahun 2018-2023, maka secara umum belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%.

A.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini diasajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	36,11 %	34,30 %	94,98	57.815.248.700	53.102.877.542	91,85	+ 3,13
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	73,86 %	79,33 %	107,40	46.450.814.500	43.106.331.065	92,80	+ 14,6
	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	– Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	23,23 %	13,64 %	58,72	5.336.932.104	1.940.393.800	36,22	+ 22,5
		– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	45,00 %	47 %	104,44	1.246.379.896	1.204.838.800	96,67	+ 7,77
	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	46,83 %	47,58 %	101,60	149.470.000	148.383.000	99,27	+ 2,33
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	64,10 %	67,13 %	104,72	964.520.000	933.262.371	99,76	+ 4,96
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	55 %	50,37 %	91,58	294.470.000	241.246.856	81,93	+ 9,65
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatn RTRW	0,56	0,54	96,42	85.430.000	85.160.100	99,68	- 3,26
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	– Timbulan sampah yang ditangani	89,12 %	84,61 %	100,54	6.731.850.000	6.461.308.400	95,98	+ 4,56

A.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja dan solusi yang diberikan.

Secara Umum pencapaian kinerja rata-rata untuk semua sasaran pada tahun 2019 ini belum tercapai 100%, meskipun terdapat beberapa sasaran yang mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori baik. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

a. Faktor penyebab tercapainya target antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2019.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
5. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Pengawasan yang semakin intensif baik dari internal dan eksternal (Tim internal Dinas, APIP, kalangan insan pers/LSM dan TP4D Kejaksaan Negeri)

b. Faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain:

1. Berkaitan dengan tupoksi pihak eksternal (sosial, politis, teknis dan wilayah)
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas PUPR. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di PD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada

tahun 2019 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

4. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

c. Adapun Solusi yang diberikan atas penurunan kinerja, khususnya yang diakibatkan oleh kurang tersedianya anggaran pada program pengendalian banjir , dengan dilakukan penambahan anggaran .

A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis kemungkinan terjadinya efesiensi atas penggunaan sumber daya disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu:

- 1) Pengadaan barang / jasa yang nilainya besar sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilaksanakan melalui sistem pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung melalui Lelang oleh ULP.
- 2) Sikap konsisten / konsekuen terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam pembayaran atas hasil pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tim P2HP dan rekomendasi BPK R.I. maupun BPKP.
- 3) Tersusunnya ketetapan harga satuan bahan dan upah dalam kontrak penawaran oleh pihak penyedia barang/jasa melalui Keputusan Bupati yang realistis, faktual dan aplikatif sehingga tidak memberatkan pihak penyedia barang/ jasa untuk bekerja dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

A.7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum Program / kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada prinsipnya telah mengacu pada orientasi yang rasionalitas, efektif dan efisien, azas manfaat, dan akuntabel serta bersifat partisipatif, terukur dan benar-benar merupakan skala prioritas berdasarkan

kebutuhan utama masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan sosial lainnya. Disamping itu, perbaikan sistem yang mengacu pada pengalaman atau evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, yang ditunjang pula oleh suasana investasi / lingkungan sosial masyarakat yang kondusif, adanya *politicalwill* yang konstruktif dan konsistensi dari pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk dalam hal ini dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam alokasi anggaran.

Sebagai salah satu instrumen pengukur dari tercapainya perjanjian kinerja ini dapat dikaitkan dengan diraihnya opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 3 kali secara berturut-turut dari BPK R.I Wilayah Kalimantan Tengah dalam pengelolaan keuangan dan aset, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan Perangkat Daerah pengelola terbesar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara hampir disetiap tahun anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.10. Realisasi Keuangan Tahun 2019

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.364.798.220	5.607.001.840	757.796.380	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12.000.000	11.790.000	210.000	98,25
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1.808.550.000	1.321.992.547	486.557.453	73,10
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	150.505.000	113.200.000	37.305.000	75,21
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	16.500.000	12.261.200	4.238.800	74,31
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	959.460.000	845.090.000	114.370.000	88,08
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	118.800.000	108.195.000	10.605.000	91,07
7	Penyediaan alat tulis kantor	82.549.967	81.026.000	1.523.967	98,15
8	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	109.050.000	98.844.000	10.206.000	90,64
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	15.000.000	14.845.000	155.000	98,97
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.525.000	14.986.000	4.539.000	76,75
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	86.000.000	84.849.000	1.151.000	98,66
12	Penyediaan makanan dan minuman	110.000.000	95.627.000	14.373.000	86,93
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	958.410.000	956.699.093	1.710.907	99,82
14	Penyediaan jasa Non PNS / Honorer	1.522.800.000	1.453.601.000	69.199.000	95,46
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	395.648.253	393.996.000	1.652.253	99,58
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.418.768.000	40.897.500.235	11.521.267.765	78,02
1	Pembangunan Rumah Jabatan	3.998.050.000	3.975.730.000	22.320.000	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000	98.638.000	1.362.000	98,64
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	410.000.000	355.456.000	54.544.000	86,70
3	Pengadaan Meubeler	70.000.000	68.648.900	1.351.100	98,07
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000	149.533.071	466.929	99,69
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	500.000.000	449.428.264	50.571.736	89,89
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100.000.000	99.343.500	656.500	99,34
7	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	47.090.718.000	35.700.722.500	11.389.995.500	75,81

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	82.000.000	80.575.000	1.425.000	98,26
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	82.000.000	80.575.000	1.425.000	98,26
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	380.000.000	375.535.712	4.464.288	98,83
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	19.900.000	100.000	99,50
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	360.000.000	355.635.712	4.364.288	98,79
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	131.500.000	111.421.100	20.078.900	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	90.000.000	77.219.000	12.781.000	85,80
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	6.000.000	5.399.000	601.000	89,98
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.500.000	2.500.000	1.000.000	71,43
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.000.000	10.233.000	1.767.000	85,28
5	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	20.000.000	16.070.100	3.929.900	
VI.	Program Pengembangan Data/Informasi	150.000.000	136.172.374	13.827.626	90,78
1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	150.000.000	136.172.374	13.827.626	90,78
VII.	Program Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	190.000.000	178.805.600	11.194.400	94,11
1	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Program	190.000.000	178.805.600	11.194.400	94,11
X.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	104.266.063.200	96.209.208.607	8.056.854.593	92,27
1	Pembangunan Jalan	33.425.429.700	31.611.495.892	1.813.933.808	94,57
2	Pembangunan Jembatan	46.450.814.500	43.106.331.065	3.344.483.435	92,80
3	Pembangunan Jalan (DAK)	24.389.819.000	21.491.381.650	2.898.437.350	88,12
XI.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.829.375.000	11.437.225.400	392.149.600	96,68
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4.597.525.000	4.478.868.000	118.657.000	97,42
2	Pengelolaan Persampahan Perkotaan	6.731.850.000	6.461.308.400	270.541.600	95,98
3	Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	500.000.000	497.049.000	2.951.000	99,41

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
XII.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.921.350.000	4.679.470.700	97.686.400	95,09
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	2.645.250.000	2.617.997.000	27.253.000	98,97
2	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	2.276.100.000	2.061.473.700	70.433.400	90,57
XIV.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.113.990.000	1.081.645.371	32.344.629	97,10
1	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	964.520.000	933.262.371	31.257.629	96,76
2	Pengembangan sistem distribusi air minum	149.470.000	148.383.000	1.087.000	99,27
XV.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	20.139.125.000	19.721.639.222	417.485.778	97,93
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	19.284.125.000	18.888.177.147	395.947.853	97,95
2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman	855.000.000	833.462.075	21.537.925	
XVII.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3.734.530.000	3.658.485.986	76.044.014	97,96
1	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	550.000.000	514.063.746	35.936.254	93,47
2	Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Dak Reguler)	2.349.530.000	2.325.820.000	23.710.000	98,99
3	Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Dak Penugasan)	270.000.000	270.000.000	0	100
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	415.000.000	398.602.240	16.397.760	96,05
XVIII.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.066.000.000	1.021.459.823	44.540.177	
1	Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat	346.000.000	301.459.823	44.540.177	
2	Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (Dak)	720.000.000	720.000.000	0	100
XIX.	Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	294.470.000	241.246.856	53.223.144	81,93
1	Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	294.470.000	241.246.856	53.223.144	81,93
XX.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	5.381.455.322	5.260.405.994	121.049.328	97,75
1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.246.379.896	1.204.838.800	41.541.096	96,67
2	Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	654.004.426	641.813.400	12.191.026	98,14
3	Pemberdayaan petani pemakai air	200.000.000	172.154.850	27.845.150	86,08

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	117.400.000	113.532.000	3.868.000	96,71
5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	3.163.671.000	3.128.066.944	35.604.056	98,87
XXI.	Program Pengendalian Banjir	6.820.392.104	3.357.435.656	3.462.956.448	49,23
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	5.356.932.104	1.904.393.800	3.416.538.304	36,22
2	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali	1.298.460.000	1.278.269.000	20.191.000	98,45
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	165.000.000	138.772.856	26.227.144	84,10
XXII.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.434.742.500	5.817.635.313	1.617.107.187	78,25
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.525.375.000	1.316.885.880	1.208.489.120	52,12
2	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.909.367.500	4.500.749.433	408.618.067	91,68
XXIII.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	55.000.000	54.774.500	225.500	99,59
1	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	55.000.000	54.774.500	225.500	99,59
XXIV.	Program Perencanaan Tata Ruang	630.455.000	613.570.326	16.884.674	97,32
1	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	85.430.000	85.160.100	269.900	99,68
2	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	166.050.000	156.906.476	9.143.524	94,49
3	Survey dan pemetaan	237.975.000	231.253.350	6.721.650	97,18
4	Pelatihan Aparat dalam perencanaan tata ruang	141.000.000	140.250.400	749.600	99,47
XXV.	Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Workshop dan Alat Berat	2.960.600.000	2.844.543.560	116.056.440	96,08
1	Pemeliharaan alat-alat berat dan angkutan darat	2.677.700.000	2.569.266.360	108.433.640	95,95
2	Peningkatan sarana dan prasarana bengkel dan Laboraturium teknik	282.900.000	275.277.200	7.622.800	97,31
	JUMLAH	230.364.614.346	203.385.759.175	26.725.431.157	88,29

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya materai dan biaya pengiriman dengan dana sebesar Rp.12.000.000,- realisasi Rp.11.790.000,- atau 98,25 %, fisik pelaksanaan surat menyurat telah dilaksanakan 100%.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini berupa terbayarnya rekening telepon, air dan listrik dengan dana sebesar Rp.1.808.550.000,- realisasi Rp.1.321.992.547,- atau 73,10 %, semua rekening tagihan selama tahun 2019 telah terbayar semua.

3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Kegiatan ini berupa upah penjaga kantor dan penjaga stone crusher dengan dana sebesar Rp.150.505.000,- realisasi keuangan Rp.113.200.000,- atau 75,21 % dan semua upah/honor penjaga telah terbayar semua dengan keamanan selama setahun telah terjamin 100%.

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Kegiatan ini meliputi jasa KIR kendaraan roda 4 dan pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 dengan dana Rp.16.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 12.261.200,- atau 74,31 % dan telah terlaksana fisik 100 %

5. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar honorarium bagi tim Pengadaan Barang dan Jasa, KPA, PPK, Pembantu PPK, PPTK, Pembantu PPTK, Bendahara, Bendahara pembantu, pengurus/penyimpan barang, pejabat penanda tangan SPM. Dengan dana kegiatan sebesar Rp. 959.460.000,- realisasi Rp.845.090.000,- atau 88,08%, dan tugas pengelolaan administrasi keuangan selama setahun telah dilaksanakan 100%.

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini digunakan untuk membayar upah tukang kebun dan cleaning service, dengan dana sebesar Rp.118.800.000,- realisasi Rp.108.195.000,- atau 91,07 %, kebersihan kantor dan penataan halaman selama setahun telah terlaksana 100%.

7. Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya alat tulis kantor dengan dana sebesar Rp.82.549.967,- realisasi Rp. 81.026.000,- atau 98,15 %. Dan kebutuhan alat tulis selama setahun telah tercukupi 100%.

8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kegiatan ini berupa berupa penyediaan barang cetakan seperti amplop dinas dan blanko SPM kertas NCR serta untuk penggandaan/fotocopy, dengan dana sebesar Rp.109.050.000,- terealisasi Rp.98.844.000,- atau 90,64 %, dan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan telah tercukupi 100%

9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yaitu lampu dan baterai dengan dana sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.845.000,- atau 98,97 % dan fisik telah 100%,

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan dana sebesar Rp.19.525.000,- realisasi Rp.14.986.000,- atau 76,75 %. dan semua kebutuhan peralatan dan bahan tersebut telah tercukupi 100%.

11. Penyediaan bahan bacaan, peralatan dan peraturan perundang –undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp.86.000.000,- realisasi Rp.84.849.000,- atau 98,66 %, dan kebutuhan bacaan dan peraturan tercukupi 100%.

12. Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu lingkup Dinas PU Kabupaten Barito Utara, dengan dana sebesar Rp.110.000.000,- realisasi Rp.95.627.000,- atau 86,93 %, dan kebutuhan makanan minuman rapat dan tamu terpenuhi 100%.

13. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa telah dihadirinya rapat koordinasi dan konsultasi baik ke ibukota provinsi maupun pusat dengan dana sebesar Rp.958.410.000,- realisasi Rp.956.699.093,- atau 99,82 %, dan koordinasi dan konsultasi selama setahun telah terlaksana 100%.

14. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa telah dilaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kecamatan se Kabupaten Barito Utara dengan dana sebesar Rp.395.648.253,- realisasi keuangan Rp.393.996.000,- atau 99,58 % dan fisik telah terlaksana 100%.

15. Penyediaan jasa non PNS/honor

Kegiatan ini terealisasi berupa terbayarnya honorarium untuk pegawai honor/ tidak tetap untuk satu tahun anggaran dengan dana sebesar Rp.1.522.800.000,- realisasi keuangan Rp.1.453.601.000,- atau 95,46 % dan realisasi fisik telah 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Rumah Jabatan

Kegiatan ini teralisasi berupa pembangunan rumah jabatan bupati dengan dana sebesar Rp. 3.998.050.000,- realisasi keuangan Rp. 3.975.730.000,-

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan alat pendingin, dan pengadaan alat rumah tangga lainnya dengan dana sebesar Rp.100.000.000,- realisasi keuangan Rp.98.638.000,- atau 98,64 %, dan fisik telah 100%.

3. Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini terealisasi diantaranya berupa pengadaan alat-alat dengan dana sebesar Rp.410.000.000,- realisasi keuangan Rp.355.456.000,- atau 86.70 % dan fisik telah 100%.

4. Pengadaan meubeleur

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan peralatan mesin – pengadaan mebeleur dengan dana sebesar Rp.70.000.000,- realisasi keuangan Rp.68.648.900,- atau 98,07 % dan fisik telah 100%.

5. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja pemeliharaan rutin untuk perbaikan beberapa kerusakan yang terjadi pada gedung dan bangunan kantor, dengan dana sebesar Rp.150.000.000,-realisai keuangan Rp.149.533.071, atau 99,69 % dan fisik telah 100%

6. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Kegiatan ini dipergunakan untuk jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas dengan dana sebesar Rp.500.000.000,- realisasi sebesar Rp.449.428.264,- atau 89,89 % dan kebutuhan jasa perbaikan, suku cadang, minyak dan pelumas terpenuhi 100%.

7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dipergunakan untuk jasa service/perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan dana sebesar Rp.100.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.99.343.500,- atau 99,34 % dan kebutuhan jasa perbaikan telah terpenuhi 100%.

8. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kegiatan ini terealisasi untuk melaksanakan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, dengan dana sebesar Rp.47.090.718.000,- realisasi keuangan Rp. 35.700.722.500,- atau 75,81 %

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas dan atributnya

Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya Pakaian Dinas Hari-hari tertentu dengan dana Rp.82.000.000,- realisasi keuangan Rp.80.575.000,- atau 98,26% dan fisik telah 100%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan dana Rp. 20.000.000,- realisasi Rp. 19.000.000,- atau 99,50% dan fisik telah 100%

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini digunakan untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan berupa biaya perjalanan dan kontribusi ,dengan dana Rp.360.000.000,- realisasi Rp.355.635.712,- atau 98,79 % dan selama setahun semua undangan mengikuti bimtek yang relevan dengan pelaksanaan tugas telah diikuti 100%.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD dengan dana Rp.90.000.000,- realisasi Rp.77.219.000,- atau 85,80 % dan laporan telah disusun.

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan semesteran dengan dana Rp.6.000.000,- realisasi Rp.5.399.000,- atau 89,98 % dan laporan telah disusun.

3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran, dengan dana Rp.3.500.000,- realisasi Rp.2.500.000,- atau 71,43 %, semua laporan telah disusun.

4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan dana Rp.12.000.000,- realisasi Rp.10.233.000,- atau 85,28 %, semua laporan telah disusun.

5. Penyusunan RKA/DPA-SKPD

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan RKA/DPA-SKPD, dengan dana Rp.20.000.000,- realisasi Rp.16.070.100,- atau 80,35 %, semua laporan telah disusun.

f. Program Pengembangan data/informasi

1. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan dana Rp. 150.000.000,- realisasi keuangan Rp. 136.172.374,- atau 90,78 % dengan fisik 100 %

g. Program Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Program

Kegiatan ini digunakan untuk biaya untuk pengendalian pelaksanaan penyusunan program, dengan dana Rp. 190.000.000,- realisasi Rp. 178.805.600,- atau 94,11 % dan realisasi fisik keuangan tercapai 100%

h. Program Pembangunan Jalan & Jembatan

1. Pembangunan Jalan

Kegiatan ini terealisasi dengan 33 Paket pekerjaan dimana diantaranya ada peningkatan jalan, pembangunan jalan dan pembayaran sisa pekerjaan pembangunan jalan, dengan dana Rp.33.425.429.700,- realisasi keuangan Rp.31.611.495.892,- atau 94,57%

2. Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan peningkatan/ pembangunan 20 paket ruas jembatan, dan diantaranya pembayaran sisa pekerjaan, dan ada beberapa paket yang batal lelang dengan dana Rp. 46.450.814.500,- realisasi keuangan Rp. 43.106.331.065,- atau 92,80 %

3. Pembangunan Jalan (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan peningkatan jalan dengan dana Rp.24.389.819.000,- realisasi keuangan Rp.21.491.381.650,- atau 88,12 %.

i. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1. Rehabilitasi/pemeliharaanJalan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk rehabilitasi jalan ,dengan dana Rp.2.645.250.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.617.997.000,- atau 98,97 %.

2. Rehabilitasi/pemeliharaanJembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk rehabilitasi terhadap jembatan dan termasuk pembangunan box culvert, dengan dana Rp.2.276.100.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.061.473.000,- atau 90,57 %

j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembuatan saluran limbah perdesaan , rehabilitasi saluran air limbah, Dengan dana Rp.964.520.000,- realisasi keuangan Rp.933.262.371,- atau 97,10 % .

2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk 1 paket peningkatan sistem distribusi air minum dengan dana sebesar Rp. 149.470.000,- realisasi keuangan Rp. 148.383.000,- atau 99,27%. Sedangkan realisasi fisik telah 100%

k. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu berupa pembangunan SPAM pedesaan. Dengan dana Rp.550.000.000,- realisasi keuangan Rp.514.063.746,- atau 93,47 %.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Reguler)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu berupa pembangunan SPAM IKK dan Tambahan Pembangunan IPA pedesaan. Dengan dana Rp.2.349.530.000,- realisasi keuangan Rp.2.325.820.000,- atau 98,69 %. Sedangkan fisik telah 100%

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Penugasan)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu berupa pembangunan IPA pedesaan. Dengan dana Rp.270.000.000,- realisasi keuangan Rp.270.000.000,- atau 100 %.

4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring evaluasi dan pelaporan terhadap program pembangunan infrastruktur pedesaan. Dengan dana Rp.415.000.000,- realisasi keuangan Rp.398.602.240,- atau 96.05%. Sedangkan realisasi fisik telah 100%

l. Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin dengan total dana sebesar Rp. 346.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 301.459.823,-

2. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK)
Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin dengan total dana sebesar Rp. 720.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 720.000.000,- atau 100 % dan realisasi fisik telah 100%

m. Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

1. Program Pembangunan Lingkungan Sanitasi Perkotaan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pembangunan Lingkungan Sanitasi Perkotaan dana Rp.294.470.000,- realisasi keuangan Rp.241.246.856,- atau 81,93 %

n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman

1. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pemukiman
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembangunan gedung, rehab, peningkatan jalan pekerjaan jalan lingkungan, dengan total dana sebesar Rp.19.284.125.000,- realisasi keuangan Rp.18.888.177.147,- atau 97,93%.
2. Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana pemukiman
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemeliharaan/rehabilitas dan pekerjaan swakelola untuk pemeliharaan rutin prasarana dan sarana lingkungan permukiman dengan dana Rp.855.000.000,- realisasi keuangan Rp.833.462.075,-.

o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan total anggaran Rp. 1.246.379.896,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.204.838.800,- atau 96,67 %
2. Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pekerjaan swakelola untuk pemeliharaan rutin/berkala jaringan dan bangunan irigasi di Kabupaten Barito Utara, dengan dana Rp.654.004.426,- realisasi keuangan Rp.641.813.400,- atau 98,14 %. Sedangkan realisasi fisik telah 100 %

3. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pelatihan/orientasi juru pengairan tingkat Kabupaten Barito Utara, dengan dana Rp.200.000.000,- realisasi Rp.172.154.850,- atau 86,08 %.

4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring evaluasi dan pelaporan terhadap program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Dengan dana Rp.117.400.000,- realisasi keuangan Rp.113.532.000,- atau 96,71 %.

5. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rehab terhadap 6 jaringan irigasi dengan dana Rp.3.163.671.000,- realisasi keuangan Rp.3.128.066.944 atau 98,87 %. Sedangkan realisasi fisik telah 100%.

p. Program Pengendalian Banjir

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembuatan turaf dan lining, perkuatan tebing dengan dana Rp.5.356.932.104,- realisasi Rp.1.940.393.800,- atau 36,22 % dan realisasi fisik 36,22 %.

2. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan normalisasi sungai dan pembersihan sungai , dengan dana Rp.1.298.460.000,- realisasi keuangan Rp. 1.278.269.000,- atau 98,45 % sedangkan fisik telah 98,45%.

3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring evaluasi dan pelaporan terhadap program Pengendalian Banjir. Dengan dana Rp.165.000.000,- realisasi keuangan Rp.138.772.856,- atau 84,10 %.

q. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan perencanaan teknis penataan kawasan tepian Sungai Barito (Water Front City) Lanjutan, dengan total dana Rp.55.000.000,- realisasi keuangan Rp.54.774.500,- atau 99,59% sedangkan fisik telah 100%.

r. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan prasarana dan sarana persampahan dan terealisasi yaitu berupa pengadaan Mobil Operasional, Mobil Pick Up Dump Sampah, Truck Amroll, Truck Dump dan Truck Kompaktor Sampah, Pengadaan Back Kontainer serta Pool Armada Angkutan Sampah. Dengan dana Rp.4.597.525.000,- realisasi Rp.4.478.868.000,- atau 97,42 %. Dengan fisik 100 %

2. Pengelolaan Persampahan Perkotaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengelolaan sampah di dalam kota dengan dana Rp. 6.731.850.000- realisasi keuangan Rp.6.461.308.400,- atau 95,98 % dengan fisik 100%

3. Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengelolaan TPA Sampah di dalam kota dengan dana Rp. 500.000.000,- realisasi Rop. 497.049.000 atau 99,41% dengan fisik 100%.

s. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Penataan RTH

Kegiatan ini terealisasi berupa Pembangunan Trotoar dan Median Jalan Kandui (Lanjutan), Penataan Taman Median Jl. H. Koyem, Pengadaan Mobil Skylift (Batal) Dengan dana Rp.2.525.375.000,- realisasi keuangan Rp.1.316.885.880,- atau 52,15 %.

2. Pemeliharaan RTH

Kegiatan ini terealisasi untuk membiayai upah/honor petugas taman, premi asuransi, pakaian petugas pemeliharaan taman dan biaya pemeliharaan taman kota, lampu hias dan alat-alat perkebunan. Dengan dana Rp. 4.909.367.500,- realisasi Rp.4.500.749.433,- atau 91,68%. Dengan fisik 100%

t. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dengan dana Rp. 85.430.000,- realisasi Rp.85.160.100,- atau 98,68 %. Dengan fisik 100%

2. Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan untuk biaya bagi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Barito Utara, Sekretariat BKPRD, Pokja Perencanaan Tata Ruang, Pokja Pemanfaatan dan pengendalian Ruang, dengan dana Rp.166.050.000,- realisasi Rp.156.906.476,- atau 94,49 %. Dengan fisik 100%

3. Survey dan Pemetaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan survey dan pemetaan dalam rangka penyediaan data-data terkait penyusunan rencana tata ruang serta pengadaan peralatan untuk mendukung pelaksanaan survey dan pemetaan, dengan dana Rp.237.975.000,- realisasi Rp.231.253.350,- atau 97,18 %. Dengan fisik 100%

4. Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan ini dilaksanakan untuk biaya pelatihan tenaga teknis GIS Tingkat Dasar dan Lanjutan bagi aparatur, bimbingan teknis dan cetak peta administrasi Kabupaten Barito Utara, dengan dana Rp.141.000.000,- realisasi Rp.140.250.400,- atau 97,18 %. Dengan fisik 100%

u. Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat

1. Pemeliharaan Alat-Alat Berat dan Angkutan Darat

Kegiatan ini terealisasi untuk pemeliharaan terhadap alat-alat berat dan angkutan darat berupa jasa perbaikan, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas dan biaya-biaya lainnya terkait pemeliharaan peralatan. Dengan dana Rp. 2.677.700.000,- realisasi keuangan Rp. 2.569.266.360,- atau 95,95 %. Sedangkan realisasi fisik telah 100%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bengkel dan Laboratorium Teknik.

Kegiatan ini terealisasi untuk pengadaan alat laboratorium, dengan dana Rp.282.900.000,- realisasi Rp.275.277.200,- atau 97,31 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 9 indikator kinerja yang telah diperjanjikan, 5 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target, sedangkan 4 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun walaupun ada indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan terkait ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab terdahulu, namun secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 95,48 %, artinya hampir mendekati target kinerja keseluruhan.

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang semakin kondusif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Muara Teweh kota Barito.

Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT.

Amin.